

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. *Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum*. Nusamedia, 2017.
- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Chazawi, A. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- H. John Kenedi., SH., M.Hum. (Penal. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (2017).
- Hsb, A M, and E.N.A.M. Sihombing. *Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dan Putusannya*. Penerbit EnamMedia, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta Bandung, 2017.
- Junaidi, J, M A R Abqa, M Abas, D Suhariyanto, A B Nugraha, F Yudhanegara, M M Rohman, H Sholihah, M Rafi'ie, dan I Dhahri. *Hukum & Hak Asasi Manusia : Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Johnson, Andrew, Richard Nixon, And Clinton Namun. "Laporan Penelitian 'Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi' Oleh : Jimly Asshiddiqie." 5, No. 3 (2004).
- Jonaedi Efendi And Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Cetakan II*. (Depok: Prenadamedia Group, 2016). Hal. 4, 2016.
- Lamintang and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Delik-Delik Khusus. Sinar Grafika, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan L*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Wahdini, S.H.M.H., dan T Ramdhani. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media, 2022.
- Politik Pembaruan Hukum Pidana. Hanafi Amrani, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI) Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5, 2019.

Sardini, N H, and G Suswanto. *60 Tahun Jimly Asshiddiqie*: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Si, P.D.T.P.S.H.M. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusamedia, 2019.

Tina Amelia And Holilur Rohman. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum*. Kaya Ilmu Bermanfaat, 2025.

Pidana, Kebijakan Hukum, Penal Policy, and Sistem Penegakan Hukum. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, n.d.

Wilandari, D F, and S I Savitri. *Hukum Pers Dan Kebebasan Berekspresi Batasan, Etika, Dan Tanggung Jawab Media*, 2026.

B. Jurnal

Alviolita, Fifink Praiseda, Barda Nawawi Arief, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 15 (2019): 48-130.

Amelia, Tina, and Holilur Rohman. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum*. Kaya Ilmu Bermanfaat, 2025.

Anggraini, Nindi. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana penghinaan Pejabat Negara Sebagai Norma Delik Aduan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2015, 44-113.

Asasi, Hak, Manusia Ham, and Berpendapat Bereksperesi. "Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia" 7, no. April (2024): 48-58.

Dari, Ditinjau, Undang-undang Informasi Traksaksi, Elektornik dan Hak Asasi. "Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Traksaksi Elektornik Dan Hak Asasi Manusia" 1, no. 1 (2025): 94-184.

Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" *Journal Of Social Science Research* (2023): 91.

Fatoni, Syamsul, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Orcid Id, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, et al. "Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana" 32, no. December 2024 (2025): 46-71.

Hermawan, Decky, M Ariel Anggara Pratama, Ayu Putryana, Universitas

Bengkulu, Criminal Code, and Article History. "Analisis Yuridis Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Terhadap Kebebasan Pers (2025)." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 11 (2025): 12.

Hukum, Fakultas, and Universitas Airlangga. "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perperspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia" 32, no. 1 (2017): 33-105.

Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2021): 217-27.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Op. Cit. Hal. 125*, n.d.

Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Cetakan II. (Depok: Prenadamedia Group, 2016). Hal. 4*, 2016.

Keadilan, Demi, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Mahkamah Konstitusi, and Republik Indonesia. "Putusan Nomor 6/PUU-V/2007," 2007, 1-81.

Kesatuan, Negara, and Republik Indonesia. "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023).

Komang Surya Mahesa, Pande, Ayu Putu Laksmi Danyathi "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Kebijakan Kriminalisasi Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis." *Jma* 3, no. 9 (2025): 3031-5220.

Muhammad Wahdini, S.H.M.H., and T Ramdhani. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media, 2022.

Natamiharja, Rudi. "Peran Negara Dalam Menjamin Kebebasan Berekspresi Menurut Konstitusi Dan Hukum HAM." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 4, no. 1 (June 5, 2025): 1-10.

Olivia, Denindah. "Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" 1, no. 2 (2020): 1-13.

"Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rio Law* 1, no. 2 (2020): 13.

Politik Pembaruan Hukum Pidana. Hanafi Amrani, 2019.

Teguh Prasetyo,SH, M.Si. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusamedia, 2019.
Rahil, Gian. "Multitafsir Norma Penghinaan Terhadap Lembaga Negara Dalam

Pasal 240 KUHP Dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 4 (2026): 26-5917.

Reform, Criminal Justice. Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia, 2012.

Sari, Rusni Mayang, Zulkarnain Ridlwan, and Rudi Natamiharja. “Pelebagaan Delik Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara Dan Kebebasan Ekspresi.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (March 29, 2025): 9.

Wempi Jh. Kumendong. “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan.” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017): 53-62.

Widayati, Lidya Suryani. “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden : Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp (2017): 34-215.

Winata, Muhammad Reza, Erlina M C Sinaga, Sharfina Sabila, and Rizkisyabana Yulistyaputri. “Kebijakan Hukum Pidana Dan Inkonstitusionalitas Terkait Penghinaan Terhadap Pemimpin Atau Lembaga Negara.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (2020): 71-98.

Wulan, Evi Retno, and Heru Kuswanto. “Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta.” *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020): 230-320.

C. Instrumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keadilan, Demi, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Mahkamah Konstitusi, And Republik Indonesia. “Putusan Nomor 6/Puu-V/2007,” 2007, 1-81.

Pembinaan, Badan, Hukum Nasional, And Republik Indonesia. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional”.